

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala ini dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban dari setiap SKPD pada ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

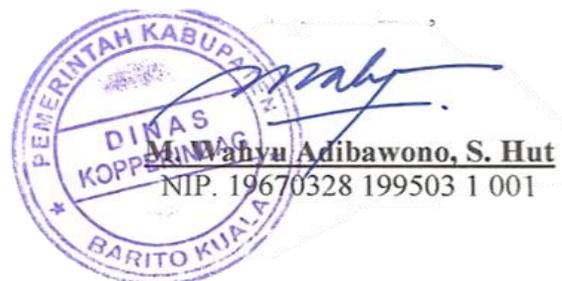
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Barito Kuala pada akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai laporan pelaksanaan kegiatan bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Barito Kuala, dan sebagai bahan penyusunan pertanggungjawaban Bupati atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Marabahan, 17 Februari 2024

Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis Organisasi	5
1.5 Landasan Hukum	5
1.6 Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	16
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV PENUTUP	62
Lampiran-lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur pelaksana desentralisasi dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam mengemban tugas tersebut, guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ditetapkan **Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan** Kabupaten Barito Kuala, yaitu **“Terwujudnya Koperasi Kuat yang didukung oleh Usaha Mikro Kecil Unggul, Industri Daerah yang Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Perdagangan yang Kondusif untuk Mendukung BATOLA SETARA** “Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan **Misi** organisasi, yaitu :

1. Merevitalisasi kelembagaan koperasi sebagai pelaku ekonomi.
2. Meningkatkan peran koperasi dalam usaha mikro kecil dalam perekonomian daerah.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi dan usaha mikro kecil.
4. Mengembangkan industri kecil dan menengah.
5. Menumbuh dan mengembangkan sentra sentra industri.
6. Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan teknologi dan industri.
7. Meningkatkan sistem distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya serta pengembangan pasar produk dalam negeri.
8. Meningkatkan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen.
9. Meningkatkan operasionalisasi dan pengembangan kemetrolagian.

Sebagai harapan yang hendak dicapai, maka ditetapkan juga sasaran-sasaran yang menjadi tujuan organisasi, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kegiatan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Meningkatkan aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan yang profesional. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan swasta serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pencapaian misi organisasi, secara umum telah dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut diarahkan guna meningkatkan pelayanan administratif yang efektif, baik dalam menunjang tugas Kepala Daerah, maupun dalam menunjang tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan tuntutan untuk menciptakan ke pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana terdapat keseimbangan antara pemerintah di satu pihak dan masyarakat serta swasta dilain pihak dalam memberikan peran mengisi tugas pemerintahan saat ini.

Namun demikian, dalam pencapaian misi organisasi tidak terlepas dari adanya kendala yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran, pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya telah dilakukan upaya-upaya dan usaha untuk mengatasinya, sehingga rencana yang telah ditetapkan akan dapat direalisasikan dengan baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Dari seluruh kegiatan dan sasaran yang telah dicapai perlu kiranya untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal pada tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah unsur pelaksana desentralisasi dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 24 November 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (Pasal 33 Ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (Pasal 33 Ayat 4).

Pemberdayaan Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*). Potensi dan peran strategisnya menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Sebagai pelaku ekonomi, merupakan perluasan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Pembangunan Perindustrian merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. *Esensi* pembangunan industri adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk agar memiliki daya saing.

Peran sektor Perdagangan semakin penting untuk mendukung sektor industri, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, turisme,

pertambahan, dan lain-lain. Meliputi revitalisasi dan harmonisasi pasar tradisional - pasar modern, perlindungan konsumen, penyediaan kebutuhan pokok, stabilitas harga, serta sinergi pengembangan UMKM dan petani di bidang perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

LKIP Tahun 2024 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala merupakan hasil evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada bidang urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Kemetrolagian pada waktu yang akan datang.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 tahun 2017 tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
- b. Pelaksanaan pembinaan urusan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan Usaha mikro, perindustrian dan perdagangan
- e. Penyelesaian atas pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

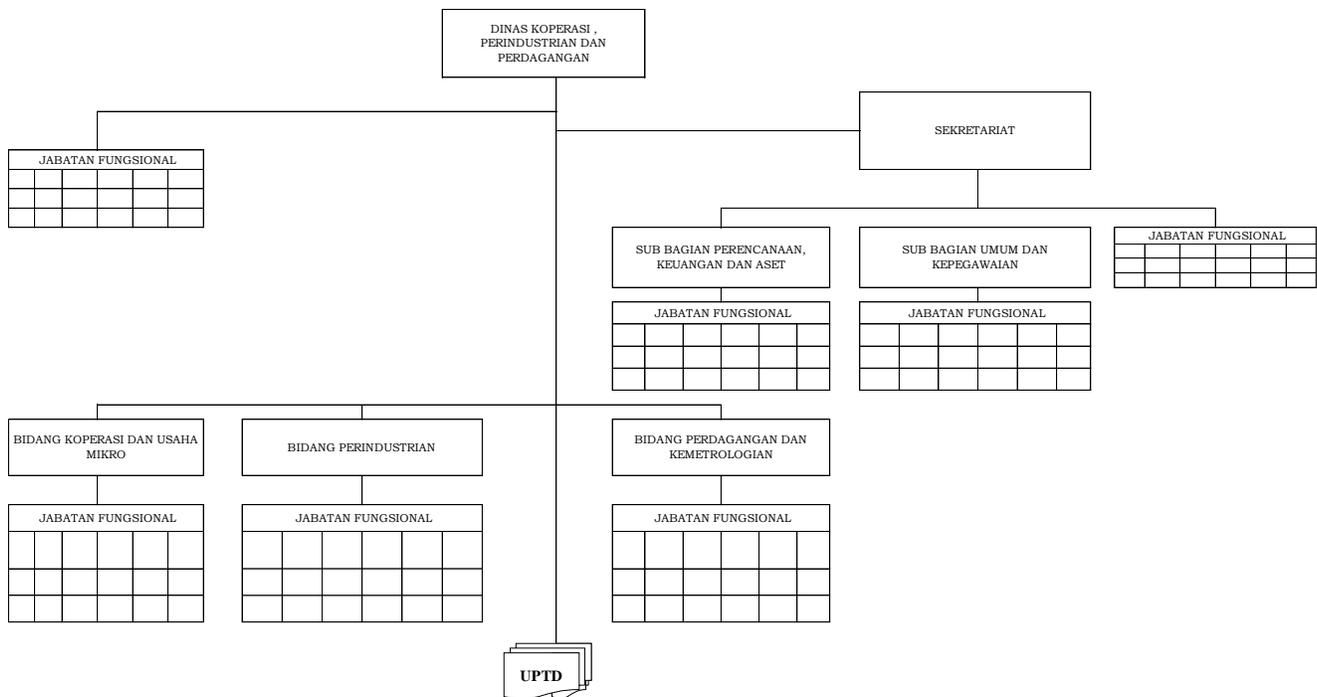
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala mempunyai Susunan Organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 1. Pengawas Koperasi Ahli Muda Sub koordinator Fasilitasi Bina Koperasi
 2. Pengawas Koperasi Ahli Muda Sub koordinator Fasilitasi Bina Usaha Mikro
- d. Bidang Perindustrian;
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub koordinator Bina Usaha Industri
- e. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian;

1. Analis Perdagangan Ahli Muda Sub koordinator Distribusi Komoditas Perdagangan
 2. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Sub koordinator Pelayanan Kemetrolagian
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
1. UPTD Pasar Marabahan
 2. UPTD Pasar Rantau Badauh
 3. UPTD Pasar Handil Bakti
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai gambaran, disajikan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021

1.4 Isu Strategis Organisasi

Dari hasil telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun terakhir, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan beberapa urusan, baik wajib maupun pilihan, yaitu urusan Koperasi dan UMKM, urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan, rumusan isu-isu strategi sebagai berikut:

- a. Kurang berkembangnya koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah;
- b. Belum optimalnya Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian masyarakat;
- c. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 70 tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 87 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.6 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Organisasi, Landasan Hukum dan Sistematika

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Meliputi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pernagkat Daerah (Renstra) PD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Meningkatnya peran dan kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah, dengan indikator PDRB perkapita;
2. Meningkatnya daya beli, dengan indikator PDRB sektor perdagangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri, dengan indikator PDRB sektor industri pengolahan;
4. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Barito Kuala.

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas, dengan indikator Persentase koperasi yang berkualitas;

2. Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil, dengan indikator Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil;
3. Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting, dengan indikator Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya;
4. Meningkatnya Perlindungan Konsumen, dengan indikator Persentase alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang standar;
5. Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing, dengan indikator Persentase produk IKM yang berdaya saing;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag, dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya peran dan kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	PDRB perkapita	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas
			Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil
2.	Meningkatnya daya beli	PDRB sektor perdagangan	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya

			Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang standar
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri	PDRB sektor industri pengolahan	Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing	Persentase produk IKM yang berdaya saing
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag	Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag

2.2. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan secara berjenjang di lingkungan pemerintah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja dipakai sebagai acuan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja juga sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada dokumen Renstra Dikopperindag Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	%	19,00	- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	59.614.670,00 7.031.495,00
2	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,28	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM	49.999.955,00 196.359.300,00
3	Terwujudnya stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	%	98	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.994.326.596,00 164.982.127,00 684.017.075,00

4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	%	94,26	- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	107.730.780,00
5.	Meningkatnya Produk IKM yang Berdaya Saing	Persentase Produk IKM yang Berdaya Saing	%	4,14	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.100.265.349,00 88.611.450,00 12.771.000,00
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag	Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag	%	75,3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.121.368.760,00

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala memiliki 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase koperasi yang berkualitas dengan target sebesar 19,00%, didukung Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 59.614.670,00 dan Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp. 7.031.495,00. Sehingga total anggaran program yang mendukung 1 (satu) indikator ini adalah Rp 66.646.165,00

2. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dengan target sebesar 0,28 %, didukung Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp 49.999.955,00. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran sebesar Rp 196.359.300,00 Sehingga total anggaran program yang mendukung 1 (satu) indikator ini adalah Rp 246.359.255,00
3. Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya dengan target 98%, didukung dengan anggaran Rp 1.994.326.596,00 Untuk mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dan barang penting, sasaran strategis ini didukung juga dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan anggaran sebesar Rp. 164.982.127,00 Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dilakukan upaya melalui program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sebesar Rp. 684.017.075,00. Sehingga total anggaran yang mendukung indikator ini sebesar Rp. 2.843.325.798,00
4. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar dengan target 92,76%, didukung Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp 107.730.780,00.
5. Persentase produk IKM yang berdaya saing dengan target 4.14 %, didukung dengan program perencanaan dan pembangunan industri sebesar Rp. 1.100.265.349,00. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota sebesar Rp. 88.611.450,00 dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional Rp 12.771.000,00.
6. Nilai Evaluasi SAKIP Diskopperindag tahun 2024 menargetkan 75,3% dengan dengan dukungan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota sebesar Rp. 5.121.368.760,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2024-2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Nomor: 050/038/Kopperindag/2024 Tahun 2024, tentang Penetapan Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran 1					
<i>Meningkatnya koperasi yang berkualitas</i>					
1	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	19,00	19,64	103.4
Sasaran 2					
<i>Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil</i>					
2	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	0,28	0	0
Sasaran 3					
<i>Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting</i>					
3	Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	Persen	98,00	91,22	93,08
Sasaran 4					
<i>Meningkatnya perlindungan konsumen</i>					
4	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	Persen	94,26	129,94	137,85
Sasaran 5					
<i>Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing</i>					
5	Persentase produk IKM yang berdaya saing	Persen	4,14	4,14	100
Sasaran 6					
<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag</i>					
6	Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag	Nilai	75,3	65,49	86,97

Tabel 3.1.2

**Capaian IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Persentase
Tahun 2024**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	4
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	1

Tabel 3.1.3

**Capaian IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2024**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	4
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	1

Dari Tabel 3.1.3 menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) indikator dikategorikan sangat baik, 1 (satu) indikator dikategorikan baik dan 1 (satu) indikator dikategorikan sangat kurang.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran

dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 050/038/Kopperindag/ 2024 Tahun 2024, tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2024

Sasaran 1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	1 indikator
Sasaran 3	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting	1 indikator
Sasaran 4	Meningkatnya perlindungan konsumen	1 indikator
Sasaran 5	Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing	1 indikator
Sasaran 6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag	1 indikator

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Predikat dan Kategori
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran (%)	Predikat	Kategori
1	Sasaran 1	1	103.4	Melebihi target	Sangat Baik
2	Sasaran 2	1	0	Tidak tercapai	Sangat Kurang
3	Sasaran 3	1	93.08	Tidak tercapai	Sangat Baik
4	Sasaran 4	1	137.85	Melebihi target	Sangat Baik
5	Sasaran 5	1	100	Tercapai	Sangat Baik
6	Sasaran 6	1	86,97	Tidak tercapai	Baik

Berdasarkan Tabel 3.2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdapat 4 (empat) capaian kinerja berdasarkan predikat dan kategori **Sangat Baik dengan kategori capaian >90** dikarenakan

1. Realisasi sasaran 103,4% dari target 100% atau capaian kinerja 103,4%
2. Realisasi sasaran 137,85% dari target 94,26% atau capaian 137,85%
3. Realisasi sasaran 100% dari target 100% atau capaian 100%
4. Realisasi sasaran 93,08% dari target 98% atau capaian 93,08

Terdapat 1 (satu) capaian kinerja berdasarkan predikat dan kategori **Baik dengan kategori capaian 75 – 89,99** dikarenakan realisasi sasaran 86,97 dari target 75,3 atau 86,97%. Sedangkan 1 (satu) capaian kinerja berdasarkan predikat dan kategori **sangat kurang dengan kategori capaian 0-49,99** dikarenakan realisasi sasaran 0 (nol) dari target 0,28 atau capaian 0%.

1

**SASARAN 1
MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS**

Sasaran “**Meningkatnya koperasi yang berkualitas**” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi II Sasaran 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat**”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase koperasi yang berkualitas

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya koperasi yang berkualitas
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			
1.	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	19,00	19,64%	103.4	19,00	103.4
	Rata-rata				103.4		103.4

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Pertama
PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS

Beberapa program indikator yang mempengaruhi indikator **Persentase koperasi yang berkualitas** ini adalah:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator **Persentase koperasi yang berkualitas** adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Koperasi Berkualitas}}{\sum \text{Koperasi aktif}} \times 100$$

Capaian Kinerja atas indikator **Persentase koperasi yang berkualitas** dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, realisasi atas **Persentase koperasi yang berkualitas** di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah 19,64 % diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah koperasi yang berkualitas dengan jumlah koperasi yang aktif. Formulasi perhitungan pada indicator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Koperasi Berkualitas}}{\sum \text{Koperasi aktif}} \times 100$$

$$\frac{11}{56} \times 100 = 19,64\%$$

Dari formulasi perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi yang berkualitas pada tahun 2024 adalah 11 koperasi, sedangkan jumlah koperasi aktif sampai tahun 2024 adalah 56 koperasi, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah data yang tersedia pada Dinas Kopperindag tahun 2024.

Tabel 3.2.4
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase koperasi yang berkualitas
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase koperasi yang berkualitas	%	19,00	19,64	103.4

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Kinerja Sasaran 1 terealisasi sebesar 19,64% koperasi yang berkembang, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 19,00%, maka capaian kinerja pada tahun kelima Renstra tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 109 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase koperasi yang berkualitas** tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase koperasi yang Berkualitas

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase koperasi yang berkembang	%	0	0
Persentase koperasi yang berkualitas	%	5,97	19,64

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Realisasi tahun 2023 sebesar 5,97% dan 2024 sebesar 19,64%, Realisasi kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan karena pada tahun 2024 sub

indikator kinerja adalah persentase koperasi yang berkembang sedangkan pada tahun 2024 sub indikator kinerja atas sasaran Indikator kinerja adalah persentase koperasi yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 ada perubahan pada Indikator kinerja utama.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase koperasi yang berkualitas mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.7
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2024
Persentase koperasi yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama	Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024
Persentase koperasi yang berkualitas	16,41	19,00	19,64	20,00	103.4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar 103.4%. Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran 1 dengan Persentase koperasi yang berkualitas dapat terlaksana sesuai dengan target Tahun 2024. Hal ini merupakan sinergisitas antara Pembina dalam melakukan pembinaan dengan pengelola Koperasi-koperasi.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase koperasi yang berkualitas terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi

Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Utama
Persentase koperasi yang berkualitas
Dengan Realisasi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab. -	Prov. Kalsel	
1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	19,64	-	39,7	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Barito Kuala atas kinerja Persentase koperasi yang berkualitas capaian Kab. Barito Kuala sebesar 19,64% dapat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian 39,7%. berdasarkan data tersebut barito kuala sudah melebihi target untuk indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas dari Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Berhasilnya pencapaian target indikator Persentase koperasi yang berkualitas tersebut disebabkan Hal ini merupakan sinergisitas antara Pembina dalam melakukan pembinaan dengan pengelola Koperasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Persentase koperasi yang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring terhadap koperasi aktif baik bidang kelembagaan, bidang organisasi dan bidang usaha secara berkala
2. Melakukan Pembinaan kepada pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dan mengikutsertakan pengurus, pengawas, pengelola dan anggota

koperasi pada setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalsel, Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalsel setda Dinas Kopperindag Kab. Batola

6. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya koperasi yang berkualitas”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya koperasi yang berkualitas*” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

1. Persentase koperasi yang berkualitas

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu sebesar Rp. 59.614.670 atau **1,48%** dari pagu Diskopperindag
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 7.031.495,00 atau **11,40%** dari pagu Diskopperindag

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (*Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber daya-nya*)

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1 Meningkatkan koperasi yang berkualitas dialokasikan dana dalam DPA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator sasaran 2 Persentase Koperasi yang berkualitas sebesar Rp 65.514.665,00 dari total pagu Rp. 66.646.165,00 dengan capaian kinerja 100% diperhitungkan dengan rumus berikut adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{66.646.165 \times 100\% - 65.514.665}{66.646.165} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

Ket : 103,4 % dijadikan 100%

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket. Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	19,00	19,64%	100	65.514.665	66.646.165	99,11	1 %

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala terdapat efisiensi karena kurang dari batas maksimal nilai efisiensi adalah 20%.

2 SASARAN 2 MENINGKATNYA USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL

Sasaran “***Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil***” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi II Sasaran 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat**”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			
1.	persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	0,28	0	0	0,28	0
	Rata-rata				0		0

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja ke dua

PERSENTASE USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL

Beberapa program indikator yang mempengaruhi indikator **persentase usaha mikro menjadi usaha kecil** ini adalah:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).
2. Program Pengembangan UMKM

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator **persentase usaha mikro menjadi usaha kecil** adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Usaha Mikro menjadi usaha Kecil}}{\sum \text{Usaha Mikro yang di fasilitasi}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja atas indikator **persentase usaha mikro menjadi usaha kecil** dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, realisasi atas **persentase usaha mikro menjadi usaha kecil** di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah 0% diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil dengan usaha mikro yang difasilitasi. Formulasi perhitungan pada indicator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Usaha Mikro menjadi usaha Kecil}}{\sum \text{Usaha Mikro yang di fasilitasi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{383} \times 100\% = 0$$

Dari formulasi perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil pada tahun 2024 adalah 0 , sedangkan jumlah usaha mikro yang difasilitasi sampai tahun 2024 adalah 383 usaha mikro. hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah data yang pada lampiran.

Tabel 3.2.10
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,28	0	0

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) terealisasi sebesar 0% untuk indikator kinerja persentase usaha mikro menjadi usaha kecil, jika dibanding dengan target tahun 2024 sebesar 0,20%, maka capaian kinerja pada tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 0%. Hal ini dikarenakan di Tahun 2024 tidak terdapat usaha mikro yang menjadi usaha kecil. Hal ini karena Usaha Mikro Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp 1.000.000.000,00-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, usaha mikro juga memiliki kriteria hasil penjualan tahunan, yaitu paling banyak Rp 2.000.000.000,-

Usaha Kecil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) **persentase usaha mikro menjadi usaha kecil** tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	%	0	0

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Masih belum berhasilnya capaian Indikator Sasaran 2 **“Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil”** Walaupun dengan didukung dengan memfasilitasi

adanya pelaksanaan pelatihan bagi UMKM dari APBN Provinsi tentang Perizinan Usaha Mikro dan Digitalisasi Produk dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyuluhan Hukum bagi pelaku Usaha mikro masih belum cukup untuk menjadikan usaha mikro menjadi usaha kecil di Tahun 2024. Realisasi Tahun 2023 sebesar 0% karena pada tahun 2023 terdapat usaha mikro menjadi usaha kecil dengan membandingkan usaha mikro yang ada sampai tahun 2024.

Diharapkan kegiatan dan pendanaannya dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dan juga di bantu oleh dana APBN agar bisa lebih terfasilitasi lagi ada Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, mengikuti expo/bazar/pameran, mempunyai aplikasi data usaha mikro se Kabupaten Barito kuala sehingga diketahui pelaku usaha yang aktif, yang akan berimbas kepada kenaikan Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2024
Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil

Indikator Kinerja Utama	Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024
Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	0,14	0,28	0	0,35	0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran 1 dengan Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil belum dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan, Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 tidak ada usaha mikro menjadi usaha kecil yang memenuhi kriteria, hanya ada pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.13
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab.	Prov. Kalsel	
1	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	%	0	-	0,30	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Barito Kuala atas kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil menunjukkan realisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Barito Kuala masih berada di bawah jika dibandingkan dengan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalsel.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Masih belum berhasilnya pencapaian target indikator Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil tersebut disebabkan Hal ini dikarenakan masih belum mampu berkembangnya usaha mikro yang melampaui klasifikasi usaha kecil walaupun sudah mendapatkan fasilitasi. Adapun kriteria untuk menjadi usaha kecil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, usaha mikro juga Selain itu, usaha mikro juga memiliki kriteria hasil penjualan tahunan, yaitu paling banyak Rp 2 miliar. Maka dengan itu tidak ada usaha mikro yang menjadi usaha kecil untuk Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Mengupdate data usaha mikro perdesa dan perkecamatan untuk di masukkan di Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) UMKM.
2. Melakukan pembinaan melalui pendampingan secara berkesinambungan kepada baik melalui pelatihan atau monitoring secara berkala
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam pengembangan produksi dan pengolahan, promosi dan pemasaran melalui media sosial atau pameran.

6. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil*” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

1. Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Pengembangan UMKM dengan pagu sebesar Rp. 49.999.955 atau 0,27% dari pagu Diskopperindag.
2. Program Pemberdayaan UMKM dengan Pagu sebesar 196.359.300
3. Program kegiatan dari APBN Provinsi dan APBD Provinsi.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya)

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2 Meningkatkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dialokasikan dana dalam DPA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator sasaran 2 Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar Rp 233.592.235,00 dari total pagu Rp. 246.359.255,00 dengan capaian kinerja 100% diperhitungkan dengan rumus berikut adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{246.359.255 \times 0\% - 233.592.235 \times 0\%}{246.359.255 \times 100\%} \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket. Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	

Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	0,28	0	0	246.359.255,0	233.592.235	94,8	0
--	--	------	---	---	---------------	-------------	------	---

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala terdapat efisiensi karena kurang dari batas maksimal nilai efisiensi adalah 20%.

3

SASARAN 3

Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting

Sasaran “**Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting**” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi II Sasaran 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat**”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya
Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.14
Capaian Kinerja Sasaran
Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			

1.	Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	Persen	98,00	91,22	93,08	98,00	93,08
	Rata-rata				93,08		93,08

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Indikator Ketiga

PERSENTASE HARGA BAHAN POKOK KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG STABIL HARGANYA

Beberapa program indikator yang mempengaruhi indikator **Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya** ini adalah:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator **Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya** adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Kebutuhan bahan pokok masyarakat yang stabil harganya}}{\sum \text{Kebutuhan pokok masyarakat yang di monitor}} \times 100$$

Capaian Kinerja atas indikator **Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya** dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, realisasi atas **Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya** di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah 91,22%, diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah kebutuhan bahan pokok

Masyarakat yang stabil harganya dengan jumlah kebutuhan pokok Masyarakat yang di monitor. Formulasi perhitungan pada indicator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kebutuhan bahan pokok masyarakat yang stabil harganya}}{\sum \text{Kebutuhan pokok masyarakat yang di monitor}} \times 100$$

$$\frac{52}{57} \times 100 = 91,22$$

Dari formulasi diatas dapat dilihat bahawa jumlah kebutuhan bahan pokok Masyarakat yang stabil harganya pada tahun 2024 adalah 52 jenis bahan pokok, sedangkan jumlah kebutuhan pokok Masyarakat yang dimonitor adalah 57 jenis bahan pokok. Hal ini dapat dilihat pada lampiran yang tersedia.

Tabel 3.2.15
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase ketersediaan bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat Tahun
2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	%	98,00	91,22	93,08

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator persentase harga bahan pokok kebutuhan Masyarakat yang stabil harganya terealisasi sebesar 91,22% jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 98,00%, maka capaian kinerja pada tahun pertama Renstra tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 93,08%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya** tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.16
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya
2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	%	84,21	91,22

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Realisasi tahun 2023 sebesar 84,21% dan tahun 2024 naik menjadi 91,22%. Tercapainya Indikator Sasaran 3 dengan indikator **“Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya”** Masih terjadi adanya stabilan harga bahan pokok yang di butuhkan masyarakat di Tahun 2024, dikarenakan terdapat beberapa harga bahan pokok yang tidak stabil dari bahan pokok yang di monitor sebanyak 57 macam (91,22%).

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase ketersediaan bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2023 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.17
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2024
Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil
harganya

Indikator Kinerja Utama	Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024
Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	90,00	98,00	91,22	98,00	93,08

Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran 3 dengan Persentase harga bahan pokok kebutuhan Masyarakat yang stabil harganya belum dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena ada beberapa barang yang harganya tidak stabil karena pengaruh beberapa factor misalnya pengaruh perubahan iklim, gagal panen atau serangan penyakit pada tanaman dan ternak. Sehingga pasokan yang diminta cenderung lebih sedikit dan membuat harga naik/turun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.18
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab.	Prov. Kalsel	
1	Persentase harga bahan pokok kebutuhan	%	91,22		-	

masyarakat yang stabil harganya					
--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan indikator kinerja persentase harga bahan pokok kebutuhan Masyarakat yang stabil harganya tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Kalsel karena indikator kinerja yang berbeda.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Tidak tercapainya target indikator Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya disebabkan adanya beberapa bahan pokok yang mengalami kelangkaan, sehingga harga bahan pokok tersebut mengalami kenaikan/tidak stabil.

Solusi yang dilakukan terkait kelangkaan tersebut dengan mengidentifikasi di beberapa kecamatan terkait kelangkaan bahan pokok dan berkoordinasi dengan dinas perdagangan provinsi Kalimantan selatan tentang stok kebutuhan bahan pokok di distributor-distributor dan dengan Upaya-upaya berikut:

1. Pelaksanaan Pasar murah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Monitoring/Sidak ke Pasar Tradisional dan Toko Modern Bersama TPID Kabupaten Barito Kuala
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Satgas Pangan
4. Bazaar LPG Dalam rangka upaya preventif kelangkaan dan kenaikan harga.

6. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “*Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya*” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

1. Persentase ketersediaan bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pagu sebesar Rp. 1.994.326.596,00 atau 20,80% dari pagu Diskopperindag
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan pagu Rp. 164.982.127,00 atau 1,72% dari pagu Diskopperindag
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu sebesar Rp 684.017.075,00 atau 7,13% dari pagu Diskopperindag.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya)

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3 Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting dialokasikan dana dalam DPA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator 1 Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya sebesar Rp. 2.776.962.940,00 dari total pagu Rp. 2.843.325.798,00 dengan capaian kinerja 93,08 % diperhitungkan dengan rumus berikut adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{((2.842.325.798,00 \times 93,08 \%) - 2.776.962.940,00)}{2.776.962.940,00} \times 100\% \end{aligned}$$

= -4.93 %

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket. Tingkat Efisiensi
		target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	98,00	91,22	93,80	2.842.325.798	2.776.962.940	97,70	- 4.93%

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala terdapat efisiensi karena kurang dari batas maksimal nilai efisiensi adalah -20%.

4 **SASARAN 4 MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Sasaran “***Meningkatnya perlindungan konsumen***” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi II Sasaran 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat**”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.19
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya perlindungan konsumen
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			
1.	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	Persen	93,50	129,94	138,97	93,50	138,97
	Rata-rata				138,97		138,97

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Keempat

PERSENTASE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
YANG STANDAR

Program indikator yang mempengaruhi indikator **Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar** ini adalah:

1. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realiasi indicator **Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar** adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Alat UTTP yang Standar}}{\sum \text{Potensi Seluruh Alat UTTP}} \times 100$$

Capaian Kinerja atas indikator **Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar** dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, realisasi atas **Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar** di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan K7abupaten Barito Kuala adalah 129,94% diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah Alat UTTP yang Standar dengan Jumlah Potensi seluruh alat UTTP. Formulasi perhitungan pada indicator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Alat UTTP yang Standar}}{\sum \text{Potensi Seluruh Alat UTTP}} \times 100$$

$$\frac{1.623}{1.249} \times 100 = 129,94\%$$

Dari formulasi perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah alat UTTP yang standar sebanyak 1.623 unit, sedangkan jumlah potensi seluruh alat UTTP adalah 1.249 unit. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah data tersedia dalam lampiran dokumen ini.

Tabel 3.2.20
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	%	94,26	129,94	137,85

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Kinerja Sasaran kinerja 4 terealisasi sebesar 129,94% Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang

dan Perlengkapannya yang Standar, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 94,26 %, maka capaian kinerja pada tahun pertama Renstra tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 137,85%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar** tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.21
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	%	115,00	129,94

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 4 **“Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar”** didukung oleh adanya Penambahan SDM untuk pelaksanaan Tera dan Tera Ulang, Ketersediaan Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Tera dan Tera Ulang. Dampak tera ulang terhadap alat UTPP adalah Masyarakat selaku konsumen terlindungi dari kesalahan pengukuran, penimbangan dan pembacaan hasil UTPP.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar

mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.22
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2024
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang
Standar

Indikator Kinerja Utama	Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	91,26	94,26	129,94	97,51	137,85

Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran 4 dengan indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar dapat terlaksananya melebihi target yang ditetapkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.23
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab.	Prov. Kalsel	
1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	%	129,94	179,30	Berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamankan kewenangan metrology legal berupa tera atau tera ulang dan pengawasan berpindahan data provinsi ke Kabupaten/kota	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Barito Kuala atas kinerja Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar di bandingkan dengan Kab. Lain masih di bawah karena realisasi dari kabupaten lain sebesar 179,30%, namun walaupun masih di bawah kabupaten lain indikator kinerja Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar sudah melampaui target yang di tetapkan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Berhasilnya pencapaian target indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar tersebut dikarenakan data Realisasi tera ulang Tahun 2024 sudah termasuk hasil implementasi inovasi “UTUH GURING” (Uji Timbangan untuk Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting) di beberapa fasilitas kesehatan yang targetnya belum di maskukan ke dalam target 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Persentase ketersediaan bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penambahan SDM Penera
2. Ketersediaan Anggaran

6. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dan Standardisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya perlindungan konsumen*” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

1. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan pagu sebesar Rp. 107.730.530,00 atau 1,12% dari pagu Diskopperindag.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (*Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya*)

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 4 Meningkatkan perlindungan konsumen dialokasikan dana dalam DPA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator 1 Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya sebesar Rp. 100.926.079,00 dari total pagu Rp. 107.730.780,00 dengan capaian kinerja 100% diperhitungkan dengan rumus berikut adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{((107.730.780 \times 100\%) - 100.926.079)}{(107.730.780 \times 100\%)} \times 100\% \\ &= 0,63\% \end{aligned}$$

Ket : 137,85% dijadikan 100%

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket. Tingkat Efisiensi
		target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	93,50	91,22	93,80	107.730.780	100.926.079	93,68	0,63%

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala terdapat efisiensi karena kurang dari batas maksimal nilai efisiensi adalah 20%.

5 SASARAN 5 MENINGKATNYA PRODUK IKM YANG BERDAYA SAING

Sasaran “***Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing***” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi II Sasaran 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat**”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase produk IKM yang berdaya saing

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.24
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2025	%
			Target	Realisasi			
1.	Persentase produk IKM yang berdaya saing	Persen	4,14	4,14	100		100
	Rata-rata				100		

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Kelima PERSENTASE PRODUK IKM YANG BERDAYA SAING

Beberapa program indikator yang mempengaruhi indikator **Persentase produk IKM yang berdaya saing** ini adalah:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator **Persentase produk IKM yang berdaya saing** adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Produk IKM yang Berdaya Saing}}{\sum \text{Produk IKM}} \times 100$$

Capaian Kinerja atas indikator **Persentase produk IKM yang berdaya saing** dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, realisasi atas **Persentase produk IKM yang berdaya saing** di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah 4,139 % diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah Produk IKM yang berdaya saing dengan Jumlah Produk IKM. Formulasi perhitungan pada indicator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Produk IKM yang Berdaya Saing}}{\sum \text{Produk IKM}} \times 100$$

$$\frac{50}{1.208} \times 100 = 4.14 \%$$

Dari formulasi diatas diketahui bahwa jumlah produk IKM yang berdaya saing adalah 50 produk, sedangkan jumlah produk IKM adalah 1,208 produk. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah data yang tersedia pada lampiran dokumen ini.

Tabel 3.2.25
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase produk IKM yang berdaya saing
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
-------------------	--------	--------	-----------	-------------

Persentase produk IKM yang berdaya saing	%	4,14	4,14	100
--	---	------	------	-----

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Kinerja Sasaran 5 terealisasi sebesar 4,139 %, kalau dibulatkan menjadi 4,14 % untuk Persentase produk IKM yang berdaya saing, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 4,14%, maka capaian kinerja pada tahun kelima Renstra tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 100 % (mencapai target).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase produk IKM yang berdaya saing** pada tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.26
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase produk IKM yang berdaya saing

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase produk IKM yang berdaya saing	%	3,54	4,14

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Keberhasilan capaian indikator sasaran 5 **“MENINGKATNYA PRODUK IKM YANG BERDAYA SAING”** didukung oleh adanya:

1. Kegiatan pelatihan - pelatihan dan penyuluhan terkait kemasan produk dan pemasaran.
2. Kegiatan pemberian bantuan kemasan bagi produk IKM terpilih.
3. Kegiatan promosi produk melalui Event Pameran yang diselenggarakan didalam dan di luar kota

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase produk IKM yang berdaya saing mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.28
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024
Persentase produk IKM yang berdaya saing

Indikator Kinerja Utama	Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2026
Persentase produk IKM yang berdaya saing	3,54	4,14	4,14	4.70	88,06%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra (tahun 2026) adalah sebesar 88,06%. Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran 5 dengan Persentase produk IKM yang berdaya saing hampir mencapai menepati target yang ditetapkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase produk IKM yang berdaya saing terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.29
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Persentase Produk IKM yang berdaya saing

Dengan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab/Kota	Prov. Kalsel	
1.	Persentase produk IKM yang berdaya saing	%	100 %	-	100%	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Barito Kuala atas kinerja Persentase produk IKM yang berdaya saing jika dibandingkan dengan capaian Dinas Perindustrian Prov. Kalsel menunjukkan bahwa persentase produk IKM yang berdaya saing pada kabupaten Barito Kuala sudah sebanding atau sama dengan persentase capaian target pada dinas Perindustrian untuk produk industri yang masuk pasar dalam negeri dan ekspor (berdaya saing).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Berhasilnya pencapaian target indikator MENINGKATNYA PRODUK IKM YANG BERDAYA SAING dikarenakan berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Persentase Produk IKM yang berdaya saing yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terkait sertifikasi usaha dan produk IKM
2. berbagai pelatihan dalam peningkatan kemasan, Kualitas dan mutu produk.
3. Melakukan pembinaan terkait pemasaran produk
4. Memberikan penyuluhan terkait kemasan/ branding produk dan pemberian bantuan kemasan kepada IKM terpilih.
5. Promosi melalui Pameran.

6. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Produk IKM Yang Berdaya Saing”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Produk IKM Yang Berdaya Saing*” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

1. Persentase produk IKM yang berdaya saing

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan pagu sebesar Rp. 1.100.265.349,00 atau 11,47% dari pagu Diskopperindag
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan pagu sebesar Rp. 88.611.450,00 atau 0,92% dari pagu Diskopperindag
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan pagu sebesar Rp. 12.771.000,00 atau 0,13 % dari pagu Diskopperindag.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (*Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya*)

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 5 Meningkatkan Produk IKM yang berdaya Saing dialokasikan dana dalam DPA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator sasaran 5 Persentase produk IKM yang berdaya saing sebesar Rp. 1.191.009.292,00 dari total pagu Rp. 1.201.647.799,00 dengan capaian kinerja 100% diperhitungkan dengan rumus berikut adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{1.201.647.799 \times 100\% - 1.191.009.292}{1.201.647.799} \times 100\% \\ &= 1\% \end{aligned}$$

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket. Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing	Persentase produk IKM yang berdaya Saing	4,14	4,139	100	1.201.647.799	1.191.009.292	99,11	1 %

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala terdapat efisiensi karena kurang dari batas maksimal nilai efisiensi adalah 20%.

6 **SASARAN 6 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DISKOPPERINDAG**

Sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag**” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi II Sasaran 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag**”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

1. Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.30
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag
Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			
1.	Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag	Persen	75,3	65,49	86,97	75,3	86,97
	Rata-rata				86,97		86,97

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Ke enam NILAI EVALUASI SAKIP DISKOPPERINDAG

Beberapa program indikator yang mempengaruhi indikator **Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag** ini adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator **Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag** adalah sebagai berikut:

Nilai berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat atas LKIP Diskopperindag

Capaian Kinerja atas indikator **Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag** dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan nilai sebesar 65,49 dengan predikat B. Penilaian hasil evaluasi SAKIP hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja baik yaitu implementasi AKIP sudah pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai evaluasi SAKIP terdiri dari beberapa komponen penilaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 3.2.31
Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,52
2	Pengukuran Kinerja	30	20,47
3	Pelaporan Kinerja	15	14,68
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	7,55
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,49
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	

1. Perencanaan Kinerja

Penilaian terhadap pemenuhan dan kualitas perencanaan kinerja tahunan telah memadai, dokumen PK telah disusun dan selaras dengan Renstra, PK telah menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan, serta telah dilengkapi dengan Rencana Aksi yang merupakan penjabaran atas target kinerja yang ada di PK.

Namun demikian, pada implementasi Perencanaan Kinerja Tahunannya masih dinilai belum optimal, karena dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Monitoring dan evaluasi Rencana aksi dilaksanakan secara periodik (per triwulan) tetapi hanya memantau realisasi serta capaian atas target Rencana Aksi

2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil persentase penilaian yang dilakukan ditemui adanya kelemahan atas pengukuran kinerja yang disajikan yaitu :

- 1) Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan rutin setiap triwulan
- 2) Belum memiliki Pengumpulan Data kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- 3) Pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional
- 4) Pengukuran kinerja hanya 50 % yang mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi
- 5) Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya dipahami setiap pegawai dan peduli untuk menindaklanjuti rekomendasi.

3. Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil persentase penilaian yang dilakukan ditemui adanya kelemahan atas pelaporan kinerja yang disajikan yakni :

- 1) Informasi dalam laporan kinerja belum secara maksimal digunakan untuk penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- 2) Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum mempengaruhi budaya kinerja organisasi karena tidak diterapkannya reward dan punishment bagi yang berkinerja bagus

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi internal masih memerlukan perbaikan pada sub komponen kualitas dan pemanfaatan. Kelemahan atas pelaporan kinerja yaitu:

1. SKPD belum mempunyai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar, karena tidak adanya pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3. Belum mempunyai/ memilikibevaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
4. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 oleh inspektorat Kabupaten Barito Kuala masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Hasil evaluasi tahun 2024 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bonot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2024 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level perangkat daerah atau SKPD.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, realisasi atas **Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag** di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah 65,49%. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah 75,3%. Dengan demikian capaian tahun 2024 adalah 86,97%.

Tabel 3.2.32
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag	%	75,3	65,49	86,97

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Kinerja Sasaran 6 terealisasi sebesar 65,49% persentase Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 75,3%, maka capaian kinerja pada tahun kelima Renstra tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 86,97%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag** tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.33
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag
Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag	%	65,28	65,49

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Terjadi peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP Diskopperindag dari Tahun ke tahun menandakan adanya perbaikan berkelanjutan yang telah dilaksanakan SKPD. Namun, masih terdapat kekurangan capaian Indikator Sasaran 6 “**Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag**” terhadap target yang di tentukan Tahun 2024 dan kiranya dapat diharapkan melakukan perbaikan lebih lanjut di tahun berikutnya.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai evaluasi SAKIP Diskopperinda mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.34
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2024
Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag

Indikator Kinerja Utama	Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024
Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag	65,18	75,3	65,49	85,18	86,97%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar 76.88%. Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran 6 dengan Persentase Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag belum dapat terlaksananya sesuai dengan target yang ditetapkan. Hambatan di karenakan pada implementasi Perencanaan Kinerja Tahunannya masih dinilai kurang memadai, Pengukuran Kinerja Masih Kurang efektif dan masih terdapat kelemahan atas pelaporan yang disajikan yang perlu di tingkatkan ke efektifitasannya

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Tidak tercapainya sesuai target indikator Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag berdasarkan hasil evaluasi SAKIP disebabkan masih Kurangnya pada implementasi Perencanaan Kinerja Tahunannya masih dinilai kurang memadai, karena rencana kinerja tahunan tersebut masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, masih belum secara berkala memantau pencapaian target Rencana Aksi serta belum memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan, serta masih terdapat kekurangan pelaksana evaluasi kinerja secara internal yang berkelanjutan dan teratur. Beberapa perbaikan yang dapat meningkatkn Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Perbaikan Sesuai Rekomendasi
2. Meningkatkan Perencanaan Kinerja Diskopperindag

3. Meningkatkan Cara Pengukuran Kinerja yang Berjenjang
4. Pelaporan yang lebih Informatif
5. Meningkatkan Evaluasi Kinerja Secara Internal

5. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag*” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

1. Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (*Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya*)

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Diskopperindag dialokasikan dana dalam DPA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator sasaran 6 Nilai Evaluasi Sakip sebesar Rp. 4.959.975.747,00 dari total pagu Rp. 5.121.368.760,00 dengan capaian kinerja 100% diperhitungkan dengan rumus berikut adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{((5.121.368.760 \times 86.97\%) - 4.959.975.747) \times 100}{5.121.368.760} \% \\ &= -11,36 \% \end{aligned}$$

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket. Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing	Persentase produk IKM yang berdaya Saing	75,3	65,49	86,97	5.121.368.760	4.959.975.747	96,84	-11,36 %

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala terdapat efisiensi karena kurang dari batas maksimal nilai efisiensi adalah -20%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 9.587.078.557,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.327.980.958,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,03 %.

Komposisi belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2024
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4.204.785.605,00	4.117.107.236,00	97,91
2	Belanja Barang dan Jasa	5.382.292.952,00	5.210.873.722,00	96,58
Jumlah		9.587.078.557,00	9.327.980.958,00	97.3

Sumber: LRA, RFK dan DPA Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja Barang dan Jasa memberikan kontribusi sebesar 96,58 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dan sisanya sebesar 97,91 % disumbangkan Belanja Pegawai.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Kabupaten Barito Kuala yang di perjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.587.078.557,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.327.980.958,00 atau 97,3%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	66.646.165,00	65.514.665,00	98.30
2	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	246.359.255,00	233.592.235,00	94.81
3	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting	2.843.325.798,00	2.719.138.824,00	95.63
4	Meningkatnya perlindungan konsumen	107.730.780,00	100.926.079,00	93.68
5	Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing	1.201.647.799,00	1.116.529.402,00	92.92

6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag	5.121.368.760,00	4.959.975.747,00	96.84
Jumlah		9.587.078.557,00	9.327.980.958	97,3

Sumber: RFK dan DPA Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang di perjanjikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.3
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1	103.4	65.514.665,00	98.30
2	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	1	0	233.592.235,00	94.81
3	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting	1	93,08	2.719.138.824,00	95.63
4	Meningkatnya perlindungan konsumen	1	137,08	100.926.079,00	93.68
5	Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing	1	100	1.116.529.402,00	92.92

6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag	1	86.97	4.959.975.747,00	96.84
Jumlah		6		9.327.980.958	97,3

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan belum terlalu efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 6 (enam) sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 1 (satu) Sasaran, 4 (empat) Sasaran di bawah 100% dan 1 (satu) Sasaran melebihi 100%. Adanya beberapa sasaran yang masih belum bisa mencapai target dengan tingkat efisiensi seperti table di bawah ini:

Tabel 3.2.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1	103.4	98.30	Tidak efisien
2	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	1	0	94.81	Tidak efisien
3	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting	1	93,08	95.63	Tidak efisien

4	Meningkatnya perlindungan konsumen	1	137,85	93.68	44,17
5	Meningkatnya produk IKM yang berdaya saing	1	100	92.92	7,08
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag	1	86.97	96.84	Tidak efisien

BAB IV

PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan sebagian dapat diselenggarakan dengan baik, namun masih ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian misi, dan sasaran dari setiap langkah strategi pembangunan yang telah ditetapkan diarahkan untuk peningkatan pelayanan administratif kepada semua perangkat daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menuju pada peningkatan pelayanan yang prima.
3. Tuntutan ke pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan kontribusi yang seimbang antara unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, karena itu peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala sebagai lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan terus dipacu dan dikembangkan.
4. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, walaupun sebagian sasaran telah dapat dicapai, namun masih perlu di lakukan perbaikan berkelanjutan demi tercapainya Sasaran kinerja yang di tetapkan dan menghasilkan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Lampiran - Lampiran